

**DIPLOMASI MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA**  
**(STUDI KASUS : PERAN HAJI AGUS SALIM TAHUN 1945-1950)<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran Haji Agus Salim dalam diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia (2) Upaya apa saja yang dilakukan Haji Agus Salim demi terwujudnya pengakuan Indonesia oleh dunia internasional. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen dan *website* yang valid. Sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan teknik penulisan deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, menjalankan diplomasi berarti menanamkan dan menunjukkan citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa dan negara yang layak merdeka. Wujud peran diplomasi yang dilakukan Haji Agus Salim adalah sarana promosi untuk menjelaskan dan meyakinkan negara-negara lain akan usaha bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Berbagai perjuangan diplomasi yang dilakukan Haji Agus Salim selama tahun 1945-1950 antara lain yaitu melalui meja perundingan, menghadiri *Inter Asian Conference*, misi diplomasi ke negara-negara Timur Tengah, dan meminta dukungan PBB dalam penyelesaian masalah Indonesia-Belanda. Perannya yang signifikan ini berhasil memberikan warna tersendiri dalam perjuangan bangsa Indonesia dan membuat ia menjadi salah satu tokoh yang membawa Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya.

**Kata kunci:** Haji Agus Salim, Diplomasi, Pengakuan kedaulatan.

---

<sup>1</sup> Jurnal ini adalah elaborasi dari skripsi yang berjudul, “*Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, Studi Kasus: Peran Haji Agus Salim Tahun 1945-1950*”, ditulis oleh Ahmad Ulinnuha (20120510413) atas bimbingan dari Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si.

## **Pendahuluan**

17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Jumat pagi waktu itu tidak membuat semua masalah selesai. Masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada satu masalah besar disamping banyak masalah lainnya. Masalah tersebut adalah belum adanya pengakuan internasional yang luas atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Belanda tidak mengakui keberadaan Negara Indonesia karena dianggap bentukan Jepang yang berbau fasisme. Berbagai cara dilakukan Belanda mulai dengan tuduhan bahwa Indonesia merupakan tempat para pemberontak, pengacau dan pembunuh yang kesemua dianggap sebagai “perilaku buruk republiken”. Agresi Militer I dan II oleh tentara Sekutu yang digunakan Belanda untuk kembali berkuasa atas Indonesia, merupakan ancaman yang mesti ditanggulangi oleh Pemerintah Indonesia pada masa itu.

Ketika para pejuang bangsa sedang bahu-membahu mempertahankan Indonesia melalui perjuangan bersenjata, perjuangan lain dilakukan oleh Haji Agus Salim yang lebih memilih untuk berjuang dalam jalur diplomasi. Dengan tekad membara, bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan dan diketahui dunia. Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi sebuah negara. Diplomasi dilakukan oleh Haji Agus Salim untuk mendapatkan pengakuan internasional atas keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara *de jure* ataupun *de facto*. Bagi negara manapun, tujuan diplomasi adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara yang sehaluan dan menetralsir negara yang memusuhi.

Ketika Haji Agus Salim tampil di panggung internasional untuk berunding dengan Belanda, istilah diplomasi belum banyak dikenal di Indonesia. Apa yang dilakukan Haji Agus Salim, dengan memilih jalan diplomasi mendapat tanggapan pro

dan kontra di dalam negeri. Berunding dengan penjajah tidak mengangkat senjata dan tidak bersedia mengambil tindakan militer, dianggap sebagai tindakan pengkhianatan oleh pejuang revolusioner. Hal yang menarik adalah sekalipun menghadapi penentangan di dalam negeri, Haji Agus Salim tetap yakin diplomasi damai itulah jalan terbaik untuk Indonesia. Tugas sebagai diplomat memang tidak mudah, Haji Agus Salim harus mengembalikan Indonesia secara utuh, mendapat pengakuan dari dunia internasional dan di atas semua itu membuat Belanda angkat kaki secepatnya dari Indonesia dengan mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Termasuk menyangkal semua tuduhan yang dibuat Belanda, dengan berbagai kepentingannya.

## **Pembahasan**

Haji Agus Salim merupakan seorang tokoh politik yang sangat cemerlang dalam kehidupannya, sejak kecil beliau telah terdidik dengan dunia luar dan banyak bergaul dengan orang Belanda dan dunia internasional. Sebelum kemerdekaan, ia memiliki pengalaman yang luar biasa dengan menghabiskan 5 tahun bekerja dalam pemerintahan Belanda. Ketika mulai aktif dalam pergerakan nasional, ia dicurigai menjadi mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah Belanda. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa Agus Salim adalah seorang yang anti-nasionalisme. Perjuangannya dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita adalah bukti bahwa dia adalah seorang yang berjiwa nasionalisme.

Perjuangan Agus Salim berlangsung selama tiga zaman : zaman Belanda, zaman Jepang dan pada masa kemerdekaan. Merupakan rentetan perjuangan yang mempunyai pengaruh besar sekali bagi bangsa dan Negara. Sahamnya dalam pergerakan pembaharuan dan kebangkitan Islam diakui secara luas. Adapun cara-cara penyebaran cita-cita perjuangannya, dilakukan melalui berbagai media seperti saluran organisasi dan surat kabar, sementara kemampuannya sebagai orator tersalur melalui pidato, ceramah, khotbah jumat dan parlemen. Sebagai tokoh perjuangan, ia punya kadar kualitas yang sulit dicari tandingannya. Terutama kecerdasannya, barangkali termasuk jenius. Perpaduan ketajaman ilmu Agama, ilmu Politik, Kemampuan Bahasa asing dan kecerdasannya yang tinggi membuatnya menjadi pribadi yang disegani. Atas kemahirannya dalam berdiplomasi dan penguasaannya atas berbagai bahasa asing, Bung Karno pun jatuh hati dan senantiasa diandalkan sebelum kemerdekaan hingga pada masa awal kemerdekaan untuk berdiri atas nama bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

Sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, Haji Agus Salim terkenal sebagai seorang diplomat yang sering mewakili Indonesia dalam perundingan internasional. Sebagai seorang diplomat Ia layaknya pejuang-pejuang yang lain berusaha sekuat tenaga berjuang untuk bangsa Indonesia. Haji Agus Salim adalah salah satu tokoh yang pandai dalam hal berbicara. Haji Agus Salim tak pernah

canggung dalam pergaulan internasional, karena sebagai diplomat beliau punya kemampuan berbahasa asing yang bagus dan kebanggaan yang tinggi akan bangsanya. Karenanya, pada event-event internasional penting yang dihadapinya, beliau selalu tampil percaya diri. Para tokoh yang hidup semasa perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia menjulukinya The Grand Old Man. Ia besar bukan karena ciri fisik atau kekuatannya bukan pula besar karena kekuasaannya, ia besar karena kecerdikan, wibawa, dan kebijaksanaanya. Tak hanya itu, ia pun pandai berdebat dan berorasi, belum lagi pemahamannya dalam ilmu agama Islam yang membuatnya menjadi panutan.

Sesungguhnya Agus Salim adalah pengusung tradisi diplomatik angkatan pertama dalam sejarah Indonesia. Karir diplomatiknya diawali dengan diangkatnya Agus Salim sebagai konsulat di Jeddah, Arab Saudi, pada kurun 1906-1911. Pengangkatan ini terwujud berkat rekomendasi ilmuwan dan ahli politik Hindia Belanda Prof. Snouck Hurgronje. Snouck Hugrounje menawarkan gagasan yang menurut pendapatnya lebih baik dari pada harus meneruskan keinginannya melanjutkan studi dokter ke Belanda. Atas rekomendasi ilmuwan dan ahli politik Belanda ini, Agus Salim menerima surat dari Kementerian Luar Negeri Belanda yang ditandatangani oleh Sekretaris Gubernur Jenderal, menawarkan kepadanya untuk masuk dinas Luar Negeri Belanda yang berposisi konsulat di Jeddah, Arab Saudi. Snouck Hurgronje, yang berperan vital sebagai peletak dasar politik Islam pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah sejak lama mengamati Agus Salim dan dengan terus terang menilainya sebagai intelektual muda yang cerdas, mempunyai pikiran yang tajam dan keberanian yang luar biasa untuk ukuran orang Melayu.

Momen inilah yang sebenarnya merupakan awal kiprah Agus Salim dalam bidang diplomasi. Kecakapan dan ketangguhan Agus Salim dalam urusan debat dan negosiasi sudah teruji sejak menjadi konsulat luar negeri Belanda di Jeddah. Pada tahun 1927, Agus Salim hadir pada Mukhtamar Alam Islami di Mekkah dan sempat berdialog panjang dengan penguasa Saudi Arabia yang terkesan atas cita-cita Agus Salim dalam upaya menyadarkan rakyat Indonesia agar terbebas dari cengkeraman

bangsa asing. Hasil dari interaksi ini Agus Salim memperoleh dana dari Raja Saudi Arabia yang dimanfaatkan untuk menerbitkan surat kabar Fadjar Asia, terbit tahun 1927 hingga 1930. Fadjar Asia adalah koran yang diterbitkan Agus Salim bersama Tjokroaminoto sebagai media pembela kepentingan rakyat yang tertindas akibat kebijakan pemerintah kolonial. Surat kabar ini benar-benar mampu memancarkan sinar harapan bagi rakyat jajahan yang tertindas. Sebagai pimpinan, Agus Salim sampai turun ke lapangan, masuk kedaerah pedalaman, berbicara dan menulis mengenai penderitaan rakyat yang tak terlukiskan dengan upah yang sangat minim.

Pada hari Sabtu 15 Maret 1947 Tuan Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay dan Utusan Istimewa Liga Arab menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab. Beliau menyampaikan keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 Nopember 1946 yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya beliau mendesak agar Republik Indonesia mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus ikut menghadiri Inter Asian Conference di New Delhi. Menanggapi hal tersebut, Sjahrir memutuskan untuk mengirim delegasi Republik Indonesia ke Mesir dan menerima undangan dari Nehru. Meskipun keberangkatannya ke New Delhi berarti tertundanya beberapa pelaksanaan Persetujuan Linggarjati, tetapi pengiriman utusan diplomatik ke New Delhi itu akan memberi manfaat jauh lebih besar. Dapat diperkirakan bahwa betapa pentingnya kedudukan Pemerintah India kelak terhadap perjuangan RI. Selain itu, Konferensi di New Delhi ini akan memberi kesempatan pula untuk mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Birma, Thailand, Tiongkok, dan lainnya.

Dengan kampanye pencitraan negatif oleh Belanda, maka pihak Republik berusaha mengimbanginya dengan mengirimkan misi diplomatik ke berbagai forum internasional. Sebelum mendarat di Kairo, Mesir, Haji Agus Salim serta delegasi Indonesia terlebih dulu menghadiri Konferensi Hubungan Antar-Asia (*Inter-Asian Relation Conference*) pada 23 Maret 1947 di New Delhi, India. Pada waktu itu pemerintah Indonesia diundang untuk turut hadir sehingga Haji Agus Salim selaku

Menteri Muda Luar Negeri diutus ke New Delhi sebagai penasehat delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut untuk menggalang solidaritas dari negara-negara Asia yang peduli pada perjuangan bangsa Indonesia. Ketika itu, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menjadi sangat populer di India dan mendapat bantuan dan sokongan yang amat meriah dari partai-partai dan rakyat India.

Dalam pengakuan B.A. Ubain dan Mohammad Moein mengatakan, “Delegasi disambut dengan meriah di lapangan terbang Palm di New delhi. Pak Haji Agus Salim yang bertubuh kecil, berjenggot putih, berpeci khas dan berusia lanjut itu menarik perhatian masyarakat India karena beliau lincah dan aktif dan suka bergaul dengan siapa saja. Beliau menguasai banyak bahasa asing, seperti inggris, perancis dan arab, dan pintar membicarakan segala sesuatu, dari soal politik, ekonomi dan sosial hingga sampai kepada pengobatan timur tradisional dengan gaya yang mudah dimengerti oleh si pendengarnya. Selama berada di New Delhi sampai akhir konferensi tanggal 1 april 1947, beliau aktif bertemu dan bertukar pikiran dengan pimpinan pemerintah India (yang masih bersifat interim), pemimpin-pemimpin dari Indian National Congress dan All-India Muslim League, seperti Pandit Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah”.

Jawaharlal Nehru menerangkan bahwa maksud dari *Inter Asian Conference* ini adalah membicarakan masalah kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Meskipun bukan konferensi politik, namun wakil delegasi Indonesia berhasil memberikan gambaran tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Setelah kunjungan ke New Delhi hubungan Indonesia dan India semakin ditingkatkan. India juga terus mendukung perjuangan Indonesia. Berturut-turut pada tanggal 28 dan 29 Agustus 1947 pesawat India tiba di Yogyakarta membawa obat-obatan dan tiga orang dokter yang secara sukarela membantu perjuangan rakyat Indonesia. India juga terus membantu perjuangan diplomasi di forum internasional. Salah satu poin penting dari hasil konferensi ini adalah dibentuknya sebuah organisasi yang dapat memayungi kepentingan negara-negara di Asia saat itu yakni *Asians Relations Organization* yang diharapkan dapat menjadi jembatan bagi

pengakuan kedaulatan Indonesia. Selanjutnya Southeast Asian Section juga akan mengadakan sebuah konferensi khusus di bulan April 1948. Beberapa negara yang akan menjadi peserta antara lain Indonesia, India, Birma, Thailand, Malaysia dan Filipina.

Persyaratan untuk menjadi seorang diplomat, seperti pengetahuan umum yang luas, pengetahuan sejarah, kebudayaan serta peradaban bangsa-bangsa, hukum internasional, pengetahuan serta penguasaan bahasa asing, pribadi yang berwatak, sikap yang luwes, ramah tamah tanpa mengorbankan prinsip, segalanya dimiliki oleh Haji Agus Salim. Demikian juga dengan wajah senyum dan simpatik. Tenang, tapi bila perlu setiap saat siap menghadapi tangkisan pihak lawan. Atau dengan kata lain, ramah tapi selalu waspada. Sebagai negara merdeka, Indonesia dihadapkan pada konsekuensi berupa perlunya dukungan alias pengakuan dari beberapa negara baik secara *de jure* dan *de facto*. Peran diplomatik Agus Salim pun dimainkan kembali. Ia menjadi pembawa amanah penting untuk melobi negara-negara luar agar memberikan pengakuan atas kehadiran negara baru bernama Indonesia. Namun, Haji Agus Salim menyadari bahwasanya perjuangan melalui jalur diplomasi tidak akan mudah. Hambatan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pertentangan pendapat dalam negeri soal diplomasi adalah tantangan yang harus dihadapi. Meskipun usianya tidak muda lagi, ia mencurahkan segala kemampuannya untuk mengabdikan pada negara.

Sesudah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, Indonesia mendapat tantangan yang berat dalam memperjuangkan dan menyuarakan kemerdekaannya. Pada era ini terdapat norma internasional yang mensyaratkan bagi entitas politik yang baru lahir untuk mendapat *recognition* atau kedaulatan menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, 27 Desember 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara. Sehingga suatu negara bisa dikatakan berdaulat baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan kata lain, negara yang berdiri hanya dengan berlandaskan adanya wilayah, penduduk dan pemerintah sudah dipastikan akan

mendapat kesulitan dalam berinteraksi dengan negara lain dikancah internasional. Pengakuan atau *recognition* dari negara-negara lain adalah mutlak adanya.

Dalam memperjuangkan dan menyuarakan kemerdekaannya, Indonesia membutuhkan pengakuan dari dunia internasional. Pengakuan sebagai negara baru ditandai bahwa negara tersebut bagian dari masyarakat internasional. Pada tanggal 13-16 Maret 1947 pemerintah Mesir mengirimkan utusan resmi ke Indonesia yaitu Mohammad Abdul Mun'im, ia adalah konsul jenderal Mesir di Bombay yang bertindak atas nama Raja Farouk menyampaikan keputusan sidang Dewan Gabungan Negara-negara Arab (Liga Arab) yang berisi anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab untuk mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Keputusan tersebut disampaikan kepada presiden Soekarno dalam pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1947. Dengan kejadian ini, dalam sejarah diplomatik Republik Indonesia dapat ditemukan dua peristiwa penting. *Pertama*, satu utusan Mesir dengan menghadapi bahaya menyampaikan pengakuan negaranya dan pengakuan Liga Arab kepada Republik Indonesia. *Kedua*, untuk pertama kalinya Republik Indonesia menyambut kedatangan utusan negara asing sekaligus utusan organisasi internasional.

Dapat dikatakan bahwa kedatangan Konsul Jenderal Mesir sebagai utusan Liga Arab kepada pemerintah Republik Indonesia telah membuka pintu yang lebar bagi diplomasi Republik Indonesia untuk dapat secara intensif berhubungan dengan negara-negara lain. Sebagai kelanjutan dari kedatangan utusan Mesir itu, maka berangkatlah sebuah misi resmi yang pertama kalinya dikirim oleh Republik Indonesia ke negara-negara Arab yang diketuai oleh Haji Agus Salim. Delegasi berangkat pada tanggal 16 Maret 1947 ke Bombay dan setelah mengadakan persiapan di Bombay meneruskan perjalanan ke Mesir. Haji Agus Salim ditunjuk sebagai ketua delegasi bersama rekan-rekannya, yakni Abdul Rahman Baswedan, Mohammad Rasyidi, Abdul Kadir dan Sutan Nazir Pamoentjak untuk misi Indonesia ke negara-negara Timur Tengah. Penunjukannya sebagai ketua juga tak lepas dari pengetahuan politiknya yang luas mengenai negara-negara Arab dan Timur Tengah.

Setiba di Mesir pada tanggal 19 April 1947, delegasi Republik Indonesia diterima sebagai tamu Liga Arab selama empat bulan. Kegiatan pertama delegasi Republik Indonesia adalah mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa yang tergabung dalam PPKI. Haji Agus Salim mewakili pemerintah Republik Indonesia mengatakan bahwa, “Kegiatan panitai di Timur Tengah telah memungkinkan Republik Indonesia dengan resmi memasuki perjuangan diplomatik di forum internasional. Dukungan negara-negara Arab telah diperoleh para mahasiswa ini. Dengan kata lain, kegiatan politik para mahasiswa di Timur Tengah telah melapangkan jalan formal perjuangan diplomatik pemerintah Republik Indonesia”. Kegiatan kedua, delegasi Republik Indonesia memulai kunjungan-kunjungan kehormatan dengan mengunjungi Istana Abidin untuk mencatatkan nama mereka dalam daftar penghormatan kerajaan, sebagai penghormatan kepada Raja Farouk. Bagi perjuangan diplomatik Republik Indonesia, hal itu dilakukan sebagai penghargaan kepada Raja Farouk yang telah mendorong pemerintah Mesir lebih tegas mendukung Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bahkan pemerintah Mesir memberikan pengakuan *de facto* kepada PPKI sebagai perwakilan Republik Indonesia sementara, sambil menunggu perwakilan Republik Indonesia resmi didirikan”.

Kegiatan ketiga, delegasi Republik Indonesia melakukan kunjungan resmi kepada Abdulrahman Azzam Pasya, Sekjen Liga Arab sebagai tuan rumah. Kepada delegasi Republik Indonesia, Pasya mengatakan bahwa para mahasiswa Indonesia telah berhasil menyampaikan kepentingan Republik Indonesia kepada negara-negara Arab. Kegiatan keempat, delegasi Republik Indonesia melakukan kunjungan kehormatan kepada Mahmud Fahmi Nokrasyi Pasya, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Mesir di Kementerian Luar Negeri Mesir. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tujuan utama delegasi Republik Indonesia ke Timur Tengah adalah untuk mengadakan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan negara-negara Arab.

Sebelum Agus Salim menandatangani perjanjian persahabatan, Nokhrashi Pasha bertemu dengan seorang perwakilan Belanda di Mesir yang menyelonong masuk ke ruangnya. Tamu itu memprotes rencana penandatanganan perjanjian Indonesia-Mesir tersebut dan mengingatkan soal hubungan ekonomi Mesir dan Belanda. Belanda menuding, melalui perjanjian itu Indonesia mengkhianati perjanjian Linggarjati yang mendudukkan Indonesia di bawah persemakmuran Belanda. Seperti yang ditulis A.R. Baswedan, Nokhrashi Pasha menolak permintaan itu dan berkata, “Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan. Sebab, Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam tidak bisa tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan”. Perwakilan Belanda meninggalkan ruangan Nokhrashi dengan raut kecewa.

Setelah mengadakan perundingan dengan Pemerintah Mesir, pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatangani Perjanjian Persahabatan Hubungan Diplomatik dan Konsuler dan Perjanjian Perdagangan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Mesir, di ruang kerja Mahmud Fahmi Nokhrashi Pasha. Menanggapi perjanjian persahabatan ini, Presiden Republik Indonesia menguasakan Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri dan ketua utusan dari pada Republik Indonesia dan Baginda Raja Mesir menguasakan Mahmoud Fahmi Nokhrachy Pasha sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Setelah menunjukkan surat kuasanya yang sah dan lengkap dan semupakat atas ketentuan-ketentuan yang berikut:

*Pasal 1*

*Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini masing-masing menyanggupi akan memeliharaakan baiknya perhubungan terhadap kepada pihak yang lain, serta mempererat pertalian-persahabatan yang menghubungkan antara rakyat pihaknya dengan rakyat pihak yang lain dan mengadakan peraturan yang perluperlu, masing-masing di dalam daerah negaranya, bagi mencegah perlakuan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum terhadap kepada keamanan damai atau ketenteraman pada pihak yang lain.*

*Pasal 2*

*Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini semupakat akan mengadakan perhubungan diplomasi dan kekonsolan antara kedua negaranya. Utusan-utusan diplomasi, demikian juga penjabat-penjabat kekonsolan dari pada tiap-tiap antara dua belah pihak itu beroleh perlakuan istimewa yang terpakai menurut umumnya asas-asas Hukum Internasional Umum, yaitu dengan memakai asas persamaan perlakuan antara kedua belah pihak.*

*Pasal 3*

*Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini memutuskan akan mengadakan pula sebuah persetujuan perniagaan sementara, bersetujuan dengan dua pucuk surat yang diiringkan kepada Perjanjian-Negara ini.*

*Pasal 4*

*Kedua belah pihak akan mengesahkan Perjanjian-Negara ini secepat dapat dilakukannya. Dan mulai berlakunya dari tanggal serah-menyerahkan surat-surat pengesahan itu di Cairo dan berlakunya untuk masa lima tahun dengan berlangsung terus dengan sendirinya padahal masing-masing daripada kedua belah pihak boleh membatalkan berlakunya itu asal dengan memberi tahu kepada pihak yang lain waktu tiga bulan sebelumnya.*

*Pasal 5*

*Surat Perjanjian-Negara ini diperbuat dengan naskah yang sama bunyinya dan sama kekuatannya dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Perancis.*

Tertulis di Cairo pada hari tanggal 21 bulan Rajab tahun 1366 bersamaan dengan hari tanggal 10 bulan Juni 1947. Dengan demikian, Mesir adalah negara pertama yang mengakui Republik Indonesia secara *de jure* dan *de facto* atas kedaulatan Indonesia. Perjanjian tersebut terdiri dari lima pasal dan ditulis dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Perancis, Arab dan Indonesia. Selain perjanjian persahabatan tersebut, Mesir juga mengadakan perjanjian perdagangan dengan pihak Indonesia. Tentu bukan suatu misi yang mudah, apalagi saat itu pemerintah Hindia Belanda dan

Kerajaan Belanda tak begitu saja membiarkan Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara lain. Di nusantara, Belanda melakukan langkah-langkah politik dan militer. Sementara di luar negeri, mereka pun tak tinggal diam, para diplomat Belanda tak akan membiarkan Indonesia diakui dunia Internasional.

Kata H.M. Rasjidi dalam *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, “Pengakuan Mesir telah menghancurkan harapan Belanda untuk dapat kembali menguasai Indonesia”. Perjanjian persahabatan Indonesia-Mesir seakan memicu negara-negara Arab dan Timur Tengah yang telah merdeka untuk berusaha mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan melakukan perjanjian persahabatan di antara mereka. Setelah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia negara-negara Arab lainnya yang mengakui Indonesia antara lain: Syiria, Yordania, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, dan Yaman. Kontribusi Liga Arab begitu besar dalam menghubungi Negara-negara anggotanya untuk menerima misi diplomatik Republik Indonesia sebagai tamu Negara. Hal ini ditunjukkan oleh Abdurrahman Azzam Pasya yang memberi dukungan selama kunjungan misi diplomatik ini keseluruh Negara Arab.

Melalui Surat No. 155/L tanggal 7 Agustus 1947 Haji Agus Salim menyampaikan kepada Kerajaan Mesir keberlangsungan tugas Delegasi Republik Indonesia untuk negara-negara Arab sebagai berikut: Mohammad Rasyidi ditugaskan sebagai *Charge d’Affaires*, Sutan Nazir Pamoentjak sebagai *Counsellor*, Mohammad Zein Hassan sebagai Sekretaris I dan Mansur Abu Makarim sebagai Sekretaris II. Mereka menjadi staf Kedutaan Republik Indonesia pada tingkat *Charge d’ affaires* di Kairo, Mesir. Ini merupakan Kedutaan Republik Indonesia yang pertama dibuka di luar negeri semenjak Proklamasi. Staf ini juga merangkap sebagai Misi Diplomatik Republik Indonesia tetap untuk negara-negara anggota Liga Arab.

Setelah selesai dari Mesir tujuan delegasi Indonesia adalah Republik Syiria. Di Syiria, delegasi Republik Indonesia mendapat sambutan resmi pemerintah Republik Syiria. Pada tanggal 2 Juli 1947 pemerintah Republik Indonesia dan Republik Syiria sepakat menandatangani perjanjian persahabatan hubungan diplomatik dan konsuler antara kedua belah pihak. Pihak Indonesia diwakili oleh Haji

Agus Salim, sedangkan Syiria diwakili oleh Jamil Mardam Bey sebagai Menteri Luar Negeri Syiria. Naskah Perjanjian tersebut sama isinya dengan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, tetapi tidak memasukkan Perjanjian Perdagangan. Dengan demikian Syiria juga mengakui secara *de jure* adanya Republik Indonesia. Upaya-upaya misi diplomatik ini dibutuhkan bukan hanya perlawanan bersenjata untuk memenangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Setelah Pengakuan dan Perjanjian Persahabatan dari Republik Syiria diperoleh, delegasi Republik Indonesia melanjutkan perjalanan ke Amman, ibukota Yordania. Pada waktu itu, Amir Abdullah meminta kepada misi diplomatik Republik Indonesia ini agar formalitas pengakuan kemerdekaan ditangguhkan, karena meskipun Yordania telah merdeka seluruh anggaran belanjanya masih dibantu Inggris. Walaupun demikian, dalam kenyataannya pemerintah Yordania mendukung keputusan Liga Arab pada 18 november 1946 untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Misi diplomatik Republik Indonesia selanjutnya meneruskan kunjungan ke Baghdad, Irak. Sambutan rakyat dan pemimpin Irak sangat meriah walaupun dalam hal pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia masih dipertimbangkan karena kuatnya pengaruh Inggris yang mendukung Belanda di wilayahnya. Pada kenyataannya, Irak telah mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang dinyatakan Liga Arab, tetapi masih menangguhkan penandatanganan perjanjian persahabatan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Mesir.

Kemudian misi diplomatik Republik Indonesia melakukan kunjungan mereka ke Lebanon, bertepatan dengan agresi militer I Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia. Haji Agus Salim sebagai ketua delegasi ini meragukan sikap pemerintah Lebanon yang tidak akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, karena pemerintah Lebanon dekat dengan bangsa Barat. Akan tetapi, Riadh Solh Bey yang menjabat sebagai Perdana Menteri Lebanon pernah menyaksikan "*Film Proklamasi*" ketika hadir dalam resepsi misi diplomatik Republik Indonesia di Kairo, akhirnya

Republik Indonesia mendapat pengakuan Lebanon pada tanggal 29 juni 1947 sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Mulai 7 agustus 1947 H.M. Rasyidi menjadi ketua misi diplomatik Republik Indonesia untuk Negara-negara Arab. Ia menggantikan dan meneruskan usaha Haji Agus Salim yang mendadak pergi untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB pada 12 agustus 1947. H.M. Rasyidi berkunjng ke Saudi Arabia pada musim haji tahun 1947 didampingi oleh Sekretaris Jenderal Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasya menghadap Raja Abdul Aziz. Haji Agus Salim menyampaikan permohonan maafnya kepada Raja Abdul Aziz Al-Saud melalui H.M. Rasyidi karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Jeddah, Saudi Arabia karena pada waktu itu Belanda sedang mengadakan agresi militernya terhadap Republik Indonesia dan Haji Agus Salim harus menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Dalam kunjungan tersebut, Raja Abdul Aziz Al Saud memberikan surat pengakuan kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah Republik Indonesia pada 21 november 1947. Pada waktu yang bersamaan, pihak Kedutaan Belanda di Saudi Arabia mengutus Sultan Pontianak, Abdul Hamid menghadap Raja Abdul Aziz Al Saud untuk menggagalkan usaha misi diplomatik Republik Indonesia di Saudi Arabia. Usaha kaki tangan Belanda ini tidak berhasil menggagalkan pengakuan Raja Abdul Aziz Al Saud terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

Kerajaan Yaman, sebagai Negara Arab yang merdeka memberikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia pada 20 november 1947. Pada waktu itu, Yaman masih tertutup dan belum mempunyai perwakilan di luar negeri selain di Liga Arab. Wakil Kerajaan Yaman di Liga Arab Ali Al Muayyad telah menandatangani kuasa usaha Republik Indonesia di Mesir dan menyampaikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Negara-negara Arab ini merupakan keberhasilan misi diplomatik Republik Indonesia. Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda dalam kabinet Syahrir memang secara gencar memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Dan ketika ada pergantian kabinet Syahrir ke kabinet Amir Syarifuddin, dari Timur Tengah Haji Agus Salim tidak kembali ke

tanah air, namun meneruskan misinya keberbagai negara dalam kedudukannya sebagai Menteri Luar Negeri. Dapat disimpulkan bahwa usaha dari Haji Agus Salim dalam merangkul negara-negara Arab agar mau mengakui negara Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa dan merupakan tonggak sejarah diplomasi dalam hubungan luar negeri Indonesia.

Peran yang dilakukan Haji Agus Salim membuahkan hasil dengan didapatkannya pengakuan baik *de facto* maupun *de jure* dari Mesir, Syiria, Lebanon, Arab Saudi, Kerajaan Yaman dan Afghanistan. Pengakuan ini tentu memerlukan tingkat *lobby* atau diplomasi-diplomasi tingkat tinggi. Hal ini cukup beralasan, mengingat Indonesia melalui Haji Agus Salim hanya mendapat pengakuan secara *de facto* saja dari India dan Pakistan. Hasil yang berbeda tersebut menunjukkan usaha diplomasi yang dilakukan cukup alot, tetapi hasilnya signifikan sehingga mengindikasikan bahwa aktor dibalik keberhasilan tersebut merupakan tokoh dengan kapasitas mumpuni. Pengakuan kapasitas ini setidaknya dapat diwakili dari pernyataan dari Prof. Schermerhoon (diplomata Belanda di era Haji Agus Salim) sebagai berikut: “Ia seorang yang sangat menarik, sedang kita melihat juga dengan jelas sekali betapa ia dihormati dikalangan Inggris. Ini berlaku juga bagi orang-orang Indonesia diluar kaum republik...dalam hubungan ini khusus saya ingat kepada Salim, yang suatu hari akan saya undang ke istana. Orang tua yang sangat pandai ini seorang jenius dalam bidang bahasa, mampu bicara dan menulis dalam paling sedikit Sembilan bahasa, mempunyai hanya satu kelemahan yaitu selama hidupnya melarat. Pada waktu ini, ia jelas bermain kearah kita. Akhirnya ia Menteri Muda Luar Negeri dank arena itu orang kedua di samping Syahrir dalam perundingan. Barangkali ia yang paling panda dari seluruh mereka itu”.

Sejarah mencatat, agresi militer Belanda I yang terjadi pada 21 Juli-5 Agustus 1947 ini menimbulkan protes dari berbagai pihak, baik dalam Negeri Belanda maupun dari luar negeri seperti India dan Australia yang memprotes agresi militer tersebut. Aksi ini tidak diperbolehkan oleh Dewan Keamanan PBB yang sudah mengikat diri dengan Piagam PBB untuk menghindarkan terjadinya peperangan dan

memberi jalan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Agresi ini jelas merupakan peluang Indonesia untuk melemahkan dukungan terhadap Belanda di forum internasional.

Setelah sukses menjalankan misi diplomatik di negara-negara Arab dan Timur Tengah, Haji Agus Salim melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada 10 Agustus 1947, ia tiba di lapangan terbang La Guardia, New York. Berhubung pada tanggal 12 Agustus 1947 akan diadakan sidang Dewan Keamanan PBB guna membicarakan sengketa antara Indonesia dan Belanda, maka dengan perantara Radio Republik Indonesia Yogyakarta, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan kunjungan resmi kepada Dewan Keamanan PBB. Lembaga internasional itu diminta untuk menerima Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim dan penasehatnya Sutan Sjahrir untuk menghadiri persidangan guna memberikan keterangan jika persetujuan Indonesia dan Belanda dibicarakan. Selain Agus Salim, delegasi Indonesia adalah Sutan Sjahrir, Charles Tambu, Soedjatmiko, dan Sumitro Djojohadikusumo. Tanggal 14 Agustus 1947, Sutan Sjahrir diberi izin untuk pertama kali memberikan keterangan tentang keadaan Indonesia selaku duta Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Ia pun mengungkapkan secara jelas eksploitasi Belanda atas Indonesia. Sjahrir sukses mematahkan argument yang disampaikan wakil Belanda, van Kleffens. Rosihan Anwar, dalam buku *Sutan Sjahrir: True Democrat, Fighter For humanity, 1909-1906*, menulis, "Tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membicarakan sengketa Indonesia-Belanda sebagai kasus dekolonisasi pertama sejak berdirinya PBB".

Berkat kepandaian diplomasi yang mereka miliki, beberapa hasil positif dapat diraih. Antara lain, akhirnya PBB bersedia memberikan dukungan bagi Bangsa Indonesia. Dewan Keamanan PBB menyerukan agar diadakan gencatan senjata dan pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN). Akibat keputusan Dewan Keamanan ini, maka pada tanggal 6 September 1947 kabinet Amir Syarifuddin atas usul Haji Agus Salim meminta agar Australia bersedia menjadi wakil Indonesia dan Belanda menunjuk Belgia sebagai wakilnya. Kemudian pada tanggal 19 September 1947,

Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Setelah anggota KTN datang ke Indonesia, diputuskan akan diadakan perundingan Renville. Perundingan ini berlangsung tanggal 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Setelah kunjungan Haji Agus Salim ke negara-negara Timur Tengah, Belanda sangat marah karena Republik Indonesia tak hanya diakui secara *de facto* tapi juga secara *de jure*. Dalam perundingan Renville, Belanda masih tetap ngotot menghalangi dan menutup pengakuan *de jure* untuk Republik atas dasar hukum internasional. Dalam suatu pertemuan di Yogyakarta tahun 1948, sekali lagi perunding Belanda menegaskan pendirian negerinya itu. Dan ini sungguh membuat para perunding Republik dengan terpaksa menerima keputusan tersebut.

Namun, Haji Agus Salim juru runding Republik yang cekatan itu beraksi dengan spontan. Dalam pengantar buku *Hadji Agus Salim: Pahlawan Nasional* (1965), Mohammad Hatta mengisahkan bagaimana Agus Salim merespon amarah Belanda atas pengakuan itu, “Kalau Tuan-tuan menganggap usaha kami untuk mendapatkan pengakuan *de jure* dari negara-negara Arab atas Republik itu bertentangan dengan Perjanjian Linggarjati, apakah aksi militer yang Tuan lancarkan terhadap kami sesuai dengan Perjanjian Linggarjati? Pengakuan *de jure* yang kami peroleh adalah akibat dari aksi militer Tuan. Kalau Tuan-tuan melancarkan sekali lagi aksi militer terhadap kami, maka kami akan mencapai pengakuan *de jure* dari seluruh dunia.

Pikiran tajam yang keluar dari mulut dan hati Haji Agus Salim yang jengkel terhadap desakan Belanda, seolah-olah merupakan amunisi dan sekaligus nujum terhadap perkembangan selanjutnya. Sikap keras Belanda akhirnya membuat mereka sekali lagi melancarkan serangan militernya yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, 18 Desember 1948. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, serangan mendadak Belanda akhirnya berhasil menguasai Yogyakarta. Para pemimpin negara yang sedang membicarakan situasi politik di istana presiden akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Benar seperti yang dikatakan Haji Agus Salim, dunia internasional semakin berpaling ke Indonesia dan memaksa Belanda untuk kembali

berunding. Berkaitan dengan Agresi Militer tersebut, bantuan dari PBB Terus berlanjut dan Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada Belanda. Dalam situasi yang genting itu, presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kemakmuran RI Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat karena Mr. Syafrudin berada di Sumatera.

Kesalahan Belanda yang beranggapan bahwa Amerika Serikat akan mendukung langkah Belanda dalam aksi militernya ternyata salah besar. Amerika Serikat justru mendesak Belanda agar menyelesaikan sengketa ini dengan damai melalui jalan perundingan. Pemerintah Amerika Serikat dengan gigih menentang aksi tersebut dan atas prakarsa Dewan Keamanan PBB diadakanlah sidang untuk mengancam tindak Agresi Belanda tersebut. Dan juru bicara Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan yaitu Prof. Jessup pun mengeluarkan sebuah *Statement*, "bahwa sekarang waktunya telah lampau untuk melihat sengketa Indonesia-Belanda secara terpotong-potong". Dewan Keamanan yang kebetulan sedang bersidang di Paris, segera membicarakan sengketa Indonesia dan Belanda begitu mereka mendengar laporan dari Panitia Jasa Baik atau Komisi Tiga Negara (KTN) kepada Dewan Keamanan PBB yang isinya menghujat tindakan militer Belanda. Dalam sidang tersebut wakil Belanda, Van Roijen mengucapkan suatu pidato yang brilian sekali untuk membela negerinya. Tetapi sebaliknya, wakil Indonesia Nico Palar menyampaikan juga pidato yang tak kalah briliannya untuk menuduh Belanda sebagai aggressor walaupun wakil Belanda membantah semua laporannya. Tetapi dengan adanya laporan tambahan dari Komisi Tiga Negara (KTN) tentang kondisi sebenarnya di Indonesia, akhirnya Dewan Keamanan PBB Lebih berpihak kepada Republik. Kejadian ini menyebabkan sikap Belanda melunak dan mau berunding kembali dengan pihak Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan para pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan. Tetapi pihak Belanda tidak mau melaksanakan resolusi itu, akibatnya pada tanggal 20 Januari 1949 Dewan Kemanan

mengeluarkan resolusinya yang lebih keras dan lebih terperinci sehingga terpaksa wakil Belanda menyerah tetapi tetap menghindari pelaksanaan resolusi itu. Melalui desakan Dewan Keamanan PBB, dukungan negara-negara Timur Tengah dan Konferensi New Delhi yang diadakan oleh Perdana Menteri Nehru akhirnya berhasil mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan antara ketua delegasi Indonesia, yaitu Mohammad Roem dengan wakil dari Kerajaan Belanda yaitu Van Roijen dibawah pengawasan UNCI di Hotel Des Indes, Jakarta pada 14 April 1949. Yang kemudian perundingan tersebut dikenal dengan perundingan Roem-Royen.

Hasil dari perundingan itu sangat mencerminkan kemenangan diplomasi yang di jalankan oleh para Diplomat Indonesia, yaitu Belanda akhirnya mengembalikan Yogyakarta ketangan Indonesia serta membebaskan para pemimpin negara yang ditawan oleh Belanda seperti Soekarno, Mohamad Hatta, Haji Agus Salim, Sutan Syahrir, Mohamad Roem, Mr. A. G. Pringgodigdo, Mr. Asaat dan Suryadharma pada tanggal 6 Juli 1949. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 1949 lahir Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar ini diadakan atas usul pemerintah Belanda yang bertindak sebagai tuan rumah, sehingga jabatan ketua dipegang oleh seorang pembesar Belanda. Namun demikian wewenang komisi PBB untuk Indonesia tetaplah sama. Ia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan agar tercapai kata sepakat. Disini jelas bahwa peran PBB dalam Konferensi Meja Bundar tidaklah pasif. Keberhasilan dalam KMB tentunya juga tak lepas dari peran PBB yang berusaha untuk ikut membantu penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda. Alhasil, melalui perjanjian KMB, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia. Usaha Haji Agus Salim untuk meminta dukungan PBB telah terbukti membuahkan hasil.

Selain dalam perundingan Linggarjati dan Renville, Haji Agus Salim juga ikut berjuang dalam Konferensi Meja Bundar mendampingi Mohamad Hatta yang ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah konferensi segitiga antara delegasi Belanda, Republik Indonesia dan BFO. Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, diadakan pendekatan dan koordinasi dengan BFO terutama

dalam hubungan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat maupun untuk menciptakan suatu front menghadapi Belanda. Perang gerilya oleh TNI dan rakyat yang sangat meningkat setelah Agresi militer Belanda II itu telah menyadarkan pemimpin-pemimpin BFO bahwa bagaimanapun Belanda tidak dapat berkuasa lagi di Indonesia. Karena BFO dan Republik Indonesia telah bersatu maka Belanda kini hanya menghadapi delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia dibawah pimpinan Mohamad Hatta berjuang dalam meja perundingan, hingga pada akhirnya melalui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Dalam KMB ini Haji Agus Salim tetap menunjukkan sikapnya sebagai putra bangsa untuk selalu berjuang demi membela bangsa Indonesia. Meskipun fisiknya yang sudah lemah, namun jasa-jasa baiknya tetap dibutuhkan. Perundingan dengan Belanda sejak proklamasi kemerdekaan RI telah berperan besar dalam dunia diplomasi Republik Indonesia. Hingga pada puncaknya Indonesia berhasil mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia internasional.

## **Kesimpulan**

Perjuangan bangsa ini dalam memperoleh kemerdekaan tidaklah mudah. Telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pejuang dan pahlawan dalam perang bersenjata maupun dalam meja perundingan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, perjuangan tidak berhenti. Pada masa-masa awal berdiri, segala macam terobosan darurat dilakukan para pendiri bangsa demi tegaknya Republik Indonesia. Banyak negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, tanpa terkecuali Belanda yang ingin kembali menjajah kembali bangsa ini. Dan inilah yang menjadi tugas berat para pendiri bangsa tanpa terkecuali bagi Haji Agus Salim. Ketika kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946 dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, Haji Agus Salim menjadi Menteri Muda Luar Negeri. Dengan kampanye pencitraan negatif oleh Belanda, maka pihak Republik Indonesia berusaha mengimbangnya dengan mengirimkan misi diplomatik ke berbagai forum internasional.

Pada hari Sabtu 15 Maret 1947 Tuan Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay dan Utusan Istimewa Liga Arab menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab yang berisi anjuran agar negara-negara anggotanya mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian, ia menganjurkan agar pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Mesir, sekaligus ikut menghadiri Konferensi Hubungan Antar-Asia (*Inter-Asian Relation Conference*) pada 23 Maret 1947 di New Delhi, India. Menanggapi hal tersebut, Sjahrir memutuskan untuk mengirim delegasi Republik Indonesia ke Mesir dan menerima undangan dari Nehru. Sehingga Haji Agus Salim selaku Menteri Muda Luar Negeri ditunjuk sebagai ketua delegasi bersama rekan-rekannya, yakni Abdul Rahman Baswedan, Mohammad Rasyidi, Abdul Kadir dan Sutan Nazir Pamoentjak ke New Delhi sebagai penasehat delegasi Indonesia dalam konferensi tersebut untuk menggalang solidaritas dari negara-negara Asia yang peduli pada perjuangan bangsa Indonesia.

Delegasi berangkat pada tanggal 16 Maret 1947 ke Bombay dan setelah mengadakan persiapan di Bombay meneruskan perjalanan ke Mesir. Kedatangan Haji Agus Salim dan rombongan ternyata tercium oleh pemerintah Belanda. Dengan berbagai cara kemudian Belanda mengutus bekas Dutanya di Arab Saudi, untuk menggagalkan usaha delegasi Indonesia. Meski Liga Arab dan Mesir tahu bahwa perjanjian Linggarjati hanya mengakui Indonesia sebagai bagian dari Indonesia Serikat bentukan Belanda dengan mengikutsertakan kepulauan-kepulauan lainnya, Mesir punya sikap sendiri. Mesir akhirnya memutuskan untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Indonesia berhak mengadakan hubungan diplomatik dengan Mesir. Perjanjian tersebut ditandatangani di Kementerian Luar Negeri Mesir pada 10 Juni 1947. Pihak Indonesia diwakili Haji Agus Salim, waktu itu sebagai wakil menteri luar negeri dan Mahmoed Fahmi al Nokrasyi sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Mesir.

Dukungan Mesir itu mempersulit Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia dan membuat harapan Belanda membentuk Indonesia Serikat yang tercantum dan Perjanjian Linggarjati pupus. Pengakuan *de facto* dan *de jure* dari Mesir kemudian disusul dengan pengakuan Lebanon, Syiria, Irak, Afghanistan, Arab Saudi dan Yaman. Ketika para pejuang bangsa sedang bahu-membahu mempertahankan Indonesia melalui perjuangan bersenjata, perjuangan lain dilakukan oleh Haji Agus Salim untuk berjuang dalam jalur diplomasi. Sebagai Menteri Muda Luar Negeri dan juru runding bagi Republik Indonesia, Haji Agus Salim melakukan banyak pembicaraan atau perundingan untuk menarik simpati dan dukungan negeri-negeri lain terhadap perjuangan Indonesia. Oleh pihak Belanda, ia ditakuti dan membuat mereka marah karena dianggap sebagai orang yang menciptakan perjanjian-perjanjian dengan luar negeri. Tak hanya itu, Haji Agus Salim juga dianggap sebagai aktor atau lakon utama misi diplomasi Indonesia di panggung dunia.

Kemudian dari Mesir, Haji Agus Salim bersama Sutan Syahrir berhasil menyelundup ke luar negeri untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Lake

Succes, New York, Amerika Serikat. Keduanya hadir sebagai utusan atas wakil Indonesia dan memberikan pembelaannya di hadapan seluruh peserta sidang PBB. Prioritas utama kepentingan nasional Indonesia pada saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dengan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Agresi militer I Belanda menuai kecaman dari negara-negara lain dan membawa masalah ini ke Sidang Dewan Keamanan PBB. Perjuangan di forum PBB membuahkan hasil dengan lahirnya resolusi gencatan senjata dan pembentukan Komite Tiga Negara terdiri atas Amerika Serikat, Australia dan Belgia. Menurut kesaksian Sjahrir kepada, pada waktu itu sikap dunia internasional umumnya maupun Amerika Serikat khususnya, tampak sangat dingin terhadap Indonesia. Namun, berkat ketangkasan diplomasi Haji Agus Salim, sikap itu mampu diubah menjadi simpati, sehingga rela membantu perjuangan Rakyat Indonesia. “Perubahan sikap dunia ini adalah hasil diplomasi Haji Agus Salim,” demikian pengakuan Sutan Syahrir kepada Solichin Salam (1961).